



## Noerhasjim Gandhi dan Peran Tokoh Agama dalam Perjuangan Integrasi Papua

*Noerhasjim Gandhi and the Role of Religious Leaders in the Integration of Papua*

**Paisal**

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Jl.A.P.Pettarani No.72 Makassar. Telp: 0411-452952

Email: umar.faisal@rocketmail.com

Info Artikel	Abstract
<p><b>Diterima</b> 12 Februari 2018</p> <p><b>Revisi I</b> 26 Maret 2018</p> <p><b>Revisi II</b> 4 April 2018</p> <p><b>Disetujui</b> 1 Mei 2018</p>	<p>Kemunculan Noerhasjim Gandhi sebagai tokoh pejuang dari tanah Papua, menjadi pemicu untuk memunculkan tokoh-tokoh lain yang diyakini berperan besar dalam membangun keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artikel ini merupakan sebuah kajian tentang biografi singkat yang mengulas satu sisi kehidupan seorang tokoh, yaitu salah seorang sukarelawan pejuang integrasi tanah Papua yang bernama Drs. KH. Noerhasjim Gandhi bin Ghozali. Lahir di Banyuwangi 11 Agustus 1935 dan wafat di Sorong 12 Oktober 2013. Awalnya ia merupakan utusan Departemen Agama untuk memenuhi permintaan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat untuk mengirimkan sukarelawan Guru Agama Islam. Ia tiba di Papua pada 5 Desember 1962 beberapa bulan pasca peristiwa Macan Tutul yang menewaskan Komodor Yos Sudarso. Dalam riwayat pendidikannya beliau menimba ilmu dari ayahnya (angkat) Kyai Moh. Shodiq di Banyuwangi, belajar <i>Qira'ah Sab'ah</i> pada KH. Abd. Karim di Gresik, santri KH. Ahmad Damanhuri di Malang. Noerhasjim Gandhi tergabung dalam laskar kesatuan yang bersifat rahasia dan bergerak di bawah tanah bernama OPI (Organisasi Pemuda Irian/Indonesia). Ia mempersiapkan dan mengawal PEPERA tahun 1969. Di Kota Sorong beliau konsentrasi di bidang Keagamaan dan Pendidikan. Sebagai anggota gerakan dari organisasi pejuang yang tugas utamanya sebagai guru Noerhasjim dan kawan-kawannya diawasi diam-diam oleh otoritas UNTEA yang masih ditunggangi Belanda. Peran sebagai guru agama yang dihormati cukup membantu dalam mendekati tokoh agama dan masyarakat setempat dan hal tersebut memudahkan dalam mengemban tugas mempengaruhi pilihan dalam Pepera di kemudian hari. Kata Kunci: Noerhasjim Gandhi, ulama Papua, integrasi, kebangsaan</p> <p><i>The emergence of Noerhasjim Gandhi as a figure of warrior from the land of Papua, became a trigger to bring other figures who were believed to play a major role in building the integrity of the Unitary Republic of Indonesia. This article is a study of a short biography that examines one side of the life of a character, namely one of the volunteers of the Papua land integration fighters named Drs. KH. Noerhasjim Gandhi bin Ghozali. Born in Banyuwangi on August 11, 1935 and died in Sorong on October 12, 2013. Initially he was a delegation from the Ministry of Religion to fulfill the request of the Supreme Command for the Liberation of West Irian to send volunteers to Islamic Religious Teachers. He arrived in Papua on December 5, 1962 a few months after the Leopard incident which killed Komodor Yos Sudarso. In his education history he learned from his father (adopted) Kyai Moh. Shodiq in Banyuwangi, studied <i>Qira'ah Sab'ah</i> at KH. Abd. Karim in Gresik, KH. Ahmad Damanhuri in Malang. Noerhasjim Gandhi is a member of a unitary unit which is classified and moves underground called OPI (Irian Youth Organization / Indonesia). He prepared and escorted PEPERA in 1969. In Sorong City he concentrated in the field of Religion and Education. As a member of the movement of a combatant organization whose main task as teacher Noerhasjim and his friends were watched secretly by the UNTEA authority which was still ridden by the Dutch. The role of a respected religious teacher is quite helpful in approaching religious leaders and the local community and this makes it easier to carry out the task of influencing choices in the future. Keywords: Noerhasjim Gandhi, Papuan cleric, intgeration, nationality</i></p>

## PENDAHULUAN

Mencermati peran sosial seorang ulama adalah hal yang masih sangat jarang dijumpai, kebanyakan pembicaraan tentang ulama hanya berputar pada peran keagamaan, dalam aspek dakwah dan pendidikan agama. Karena itu, kajian tentang perjuangan seorang ulama dalam proses integrasi Papua dalam tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), merupakan suatu hal menarik untuk didiskusikan sebagai sarana meneguhkan kebangsaan dan identitas jati diri generasi Indonesia dari semua lapisan. Tidak hanya mereka yang hidup di perkotaan yang selama ini seolah mendominasi narasi perjuangan kemerdekaan Indonesia, tetapi sampai kepada pelosok-pelosok desa seperti di Papua. Sehingga semboyan persatuan dalam perbedaan tidak hanya nyaring dalam semboyan dari Sabang sampai Merauke. Tapi dapat menjadi narasi bagi setiap generasi dengan identitas ketokohan yang dekat dan melekat dengan keseharian mereka.

Tercatat dalam sejarah proses integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melewati proses yang sangat rumit dan panjang, kondisi inilah yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia, puncak dari semua perjuangan panjang yang dilalui adalah referendum yang dikenal dengan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang digelar

pada tahun 1969 (Rohim, 2014: 80-87).

Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Papua belum lepas dari cengkeraman Belanda yang enggan melepasnya untuk menjadi bagian dari NKRI yang baru saja merdeka. Di tengah pergolakan yang terus terjadi di tanah Papua, Pemerintah Republik Indonesia terus melakukan upaya diplomasi, perundingan yang cukup terkenal bernama Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 1949 di Deen Haag, Belanda (Muyasaroh, 2015: 59). Dalam KMB tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi kesepakatan bersama RI-Belanda di antaranya disetujui bekas jajahan yang termasuk bagian Hindia Belanda akan dikembalikan/diberikan ke Negara Indonesia selambat-lambatnya 2 tahun setelah KMB.

Pengakuan dan penyerahan kekuasaan atas wilayah jajahan atas wilayah jajahan Hindia Belanda kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Penyerahan itu dilakukan secara simbolis dengan dua upacara. Upacara pertama berlangsung di Amsterdam, di Istana *Op de Dam*, dihadiri oleh Wakil Presiden Mohamad Hatta, sekaligus Perdana Menteri, sebagai pemimpin delegasi Indonesia dan Ratu Juliana serta segenap kabinet Belanda. Upacara kedua berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dihadiri oleh wakil tinggi mahkota Belanda di Indonesia Tony

Lovink dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai wakil perdana menteri Indonesia (<http://warejapapuaku.blogspot.com/2013/12/sejarah-kembalinya-papua-ke-pangkuan.html> Akses 3 Januari 2018).

Proses pengintegrasian Papua yang melibatkan segenap perjuangan masyarakat Papua, menyisakan beberapa kisah heroik yang tidak hanya sekedar menjadi kenangan. Tetapi diharapkan dapat menjadi daya dorong bagi generasi bangsa untuk mewujudkan ketahanan identitas kebangsaan, dengan menciptakan narasi yang lebih dekat dengan kehidupan keseharian mereka, di antaranya dengan menengahkan kisah perjuangan seorang tokoh atau yang dikenal ulama di kalangan masyarakat Papua. Sebuah artikel yang ditulis dengan pendekatan biografi singkat yang menyoroti bagian khusus dari kehidupan seorang tokoh.

Penelitian biografi ulama telah beberapa kali dilakukan oleh Litbang Agama Makassar, seperti penelitian biografi kehidupan Sitti Chadijah Toana yang dilakukan di Kota Palu Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan metode pengalaman hidup *Life history technique* sebagai bagian dari metode biografi, yaitu suatu metode yang mengungkap riwayat hidup seseorang dalam aspek tertentu yang disajikan secara kualitatif deskriptif. Sitti Chadijah Toana mempunyai fase hidup yang menarik dalam hal perjuangannya membela hak-hak perempuan

yang tertindas. Pembelaannya terhadap perempuan tidak hanya dalam hal menyelamatkan mereka dari suatu penindasan. Melainkan juga sangat menekankan pentingnya menyelamatkan kehidupan spiritual mereka. Sehingga corak pembinaannya terhadap korban yang ditanganinya lebih bersifat edukatif dan religius, di bawah organisasi yang beliau rintis yaitu Pondok Pesantren Dhuafa yang sekaligus merupakan lembaga perlindungan terhadap perempuan, remaja dan anak-anak korban kekerasan dan ketidakadilan (Subair, 2013: 199).

Penelitian terkait tokoh agama juga terungkap dalam sebuah penelitian terkait merawat kerukunan umat beragama berbasis kearifan lokal di Papua Barat, di mana seorang tokoh migran Bugis bernama H. Appe, menunjukkan suatu fenomena integrasi sosial yang harmonis dengan penduduk lokal, dengan penerimaan tokoh adat Papua berdasarkan asas tradisi, bahwa orang yang baik akan selalu dibalas dengan kebaikan yang lebih, sehingga ia diterima menjadi bagian dari keluarga seorang kepala suku, bahkan sampai mewarisi beberapa lahan menjadi hak miliknya, yang disaksikan oleh warga dengan kesadaran atau tanpa paksaan (Mustafa, 2016: 12-18). Tulisan ini menampilkan satu sisi kehidupan seorang H. Appe yang dikenal dermawan dan taat beragama.

Adapun terkait dengan kajian tokoh agama Papua, terungkap dalam sebuah tulisan yang mengulas pola-pola agama di Papua dengan berfokus pada karakteristik dan peran pemimpin agama dalam masyarakat. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada biografi tokoh agama dan pejuang Islam: Aipon Asso. Dia adalah seorang kepala suku yang sangat rajin dalam hal menyebarkan Islam di Papua, khususnya di desa Walesi, yang terletak di Kabupaten Jayawijaya. Meskipun ia tidak memiliki banyak kualifikasi pendidikan, ia adalah tokoh kunci dalam perang melawan OPM. Agamanya adalah pusat dari perjuangannya. Melalui kegiatan politiknya, Aipon Asso menjadi teladan bagi warga. Sebagai seorang Muslim, ia menjadi pelindung dan teladan bagi orang-orang untuk memeluk Islam. Singkatnya, pola islamisasi dalam kasus ini adalah *top down*. Sederhananya, keyakinan agama orang-orang di Walesi sangat dipengaruhi oleh keputusan para pemimpin mereka dalam memilih dan berjuang untuk keyakinan agamanya (Muslim, 2014: 7-21).

Perhatian terhadap Papua dalam konteks kajian tokoh tampak sudah mulai dilirik, dengan munculnya tulisan-tulisan terkait dengan tokoh asli Papua, khususnya bagi mereka yang mempunyai andil dalam pembangunan dan perjuangan dalam berbagai aspek. Sehingga tulisan ini juga diharapkan dapat

memperkaya khazanah pengabdian orang-orang asli Papua yang belum banyak dikenal publik. Sebagaimana asingnya Drs. KH. Noerhasyim Gandhi bin Ghozali, yang diulas dengan pendekatan biografi singkat, dengan penekanan terhadap suatu fase kehidupannya sebagai salah seorang sukarelawan pejuang integrasi tanah Papua.

## PEMBAHASAN

Hasil kesepakatan dalam KMB tersebut juga di antaranya pada butir ke 6, pasal 2 perjanjian KMB 1949 menyatakan bahwa “kedudukan Irian Barat akan dirundingkan antara kerajaan Belanda dan Republik Indonesia Serikat (RIS) setahun setelah perundingan”. Tindak lanjut perundingan terkait status wilayah Irian Barat dilaksanakan di Jakarta bulan Maret 1950 pada “Konferensi Uni Indonesia-Belanda” namun perundingan ini gagal mencapai kesepakatan terkait status Irian Barat. Selanjutnya dalam rangka melanjutkan perundingan tersebut, Maka pada bulan Desember tahun 1950, Belanda dan Indonesia menyelenggarakan “Konferensi Khusus” di Hague-Belanda, namun baik Indonesia maupun Belanda tidak mendapatkan suatu titik temu kesepakatan dan saling mempertahankan kepentingannya masing-masing, dan yang mana Belanda semakin memantapkan status quo-nya di Irian dan mempersiapkan pembentukan Irian sebagai sebuah Negara dan

kemudian mendeklarasikan kemerdekaan Negara Papua pada tanggal 1 Desember 1961 di Hollandia (Kini Jayapura) melalui KNP (Komite Nasional Papua) dengan nama Negara "West Papua", lambang Negara "Burung Mambruk", Bendera "Bintang Kejora", Lagu Kebangsaan "Hai Tanahku Papua" dan Semboyan "*One People One Soul*" (Korwa, 2014: 15).

Belanda yang kukuh dan tak mau melepas Papua terus berupaya mendapatkan dukungan dari beberapa Negara lain di antaranya dengan Australia yang diyakini juga memiliki kepentingan terhadap potensi kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) tanah Papua dengan total jumlah penduduk pada tahun 1960-an diperkirakan hanya mencapai 815 ribu jiwa. Sebagai perbandingan, kini, Papua yang memiliki luas wilayah mencapai 421.981 KM<sup>2</sup> (jauh lebih besar jika dibandingkan dengan luas pulau Jawa), topografi Papua meliputi daerah pegunungan dan sebagian besar tanah yang berawa-rawa di daerah pesisir. Papua berbatasan dengan; Laut Halmahera dan Samudra Pasifik di utara, Laut Arafura dan Australia di sebelah selatan, Papua New Guinea di sebelah timur, dan Laut Arafura, Laut Banda dan Maluku di sebelah barat. Menurut data BPS Papua dan Papua Barat Tahun 2018 Total penduduk Papua adalah sekitar 4.180.563 jiwa di Papua 3.265.202 jiwa dan di Provinsi Papua Barat sebanyak 915.361

jiwa (BPS, 2018), jumlah penduduk ini diperkirakan hanya sekitar 1% dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia, penduduk Papua tinggal di wilayah pedesaan dan di pegunungan yang terpencil mencapai.

Pada tahun 1961, untuk mengantisipasi upaya Belanda yang berupaya mempertahankan Papua, Presiden Republik Indonesia Soekarno mengumumkan maklumat Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961. Trikora (Tri Komando Rakyat) menjadi sebuah tonggak bersejarah perlawanan Indonesia terhadap Belanda untuk Indonesia. Maklumat Trikora memuat 1) Gagalakan pembentukan Negara Boneka Papua bentukan Netherland; 2) Kibarkan sang Merah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia; 3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa Indonesia.

Pasca pidato berapi-api Soekarno di Jojga yang memantik semangat perlawanan warga Papua pro Integrasi, terjadi beberapa insiden konfrontasi yang melibatkan pejuang integrasi dan militer Belanda. Selain itu Bung Karno menggalang dukungan dari Negara-negara Asia Afrika hingga ke Uni Sovyet yang menghasilkan dukungan 24 buah pesawat pembom TU-16, MiG-19 dan MiG-17 yang terkenal ditakuti Belanda bahkan Amerika. Amerika yang khawatir

terjadinya perang besar yang bahkan bisa memicu terjadinya perang dunia akhirnya bersama Inggris memfasilitasi perundingan Indonesia-Belanda yang kemudian menghasilkan New York Agreement pada tahun 1962. Indonesia yang diwakili oleh Soebandrio dan Belanda Jan Herman van Roijen dan Schurmann melakukan penandatanganan kesepakatan pada tanggal 15 Agustus 1962, pada tanggal 20 Agustus dilakukan pertukaran kesepakatan yang memuat peta jalan penyelesaian sengketa wilayah Papua. Perjanjian tersebut meski telah disepakati namun belum bisa berlaku otomatis karena hal ini menyeret otoritas PBB untuk memfasilitasi langkah-langkah selanjutnya. Papua menjadi wilayah dalam pengawasan PBB secara resmi pada tanggal 1 Oktober 1962 oleh H. Veldkamp (wakil gubernur jenderal Belanda) melalui badan yang dibentuk PBB bernama United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). UNTEA merupakan otoritas sementara yang mengatur masalah Papua dan pelayanan Pemerintahannya hingga tiba masanya pelaksanaan Referendum 1 Mei 1963 yang kini diperingati sebagai Hari Integrasi Papua merupakan hari penyerahan Papua Barat ke Indonesia, Hollandia (kini Jayapura) yang merupakan ibukota Papua Barat pada masa pendudukan Belanda berubah nama menjadi Kota Baru. 4 Mei 1963 Bung Karno mengunjungi Jayapura dan menyampaikan

orasi pembakar semangat “Irian Barat sejak 17 Agustus 1945 sudah masuk dalam wilayah Republik Indonesia. Orang kadang-kadang berkata memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah ibu pertiwi, Salah! Tidak! Irian Barat sejak daripada dahulu sudah masuk dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia” (Cuplikan Pidato Soekarno yang dikutip dari buku “Mahmud Rumagesan; Pejuang Integrasi Papua).

Perjuangan Integrasi Papua belum selesai dengan penyerahan tersebut. UNTEA harus melaksanakan jajak pendapat (referendum) untuk menentukan kesediaan warga Papua menjadi bagian dari Negara Indonesia. Terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan yang mengiringi perjalanan Integrasi Papua ini yang hingga saat ini terus dipertanyakan dan dengan berbagai alasan tersebut menyebabkan munculnya OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang terus melakukan perlawanan hingga hari ini. Hal yang disorot itu di antaranya New York Agreement tidak melibatkan seorang pun wakil dari Papua, tahun 1964 misalnya muncul penduduk asli Papua berpendidikan Belanda yang meminta Papua merdeka bukan hanya dari pendudukan Belanda tapi juga menolak integrasi ke Indonesia, hal ini merupakan kelanjutan perjuangan para pejuang Papua Merdeka yang dipengaruhi Belanda beberapa tahun sebelumnya mengkomodasi pembentukan Niuew

Guinea Raad (legislative Papua) yang merupakan perwakilan berisikan 50% warga asli Papua, bendera Bintang Kejora dikibarkan berdampingan dengan bendera Belanda dengan lagu kebangsaan Papua berjudul “Hai Tanahku Papua” (Sugandi, 2008: 12-45).

Pemungutan suara “pilihan bebas” (*free choice*) yang diterapkan oleh PBB dilaksanakan pada tahun 1969 dengan melibatkan lebih dari 1000 kepala suku yang dipilih sebagai perwujudan dari “konsultasi” lokal (dari perkiraan jumlah penduduk pada saat itu sebanyak 800.000 orang), dan bukannya dengan mengadakan pemungutan suara; satu orang satu suara. Masalah keterwakilan politik di atas terkait dengan pendekatan tanpa melibatkan partisipasi penduduk Papua dalam proses pembuatan keputusan dalam keberadaan hidup mereka. Hal tersebut di atas berakibat pada keluhan-keluhan bersejarah yang berakar dari perbedaan persepsi mengenai integrasi Papua ke dalam Negara Indonesia. Selama sejarah integrasi Papua tidak dianalisis secara kritis dan terbuka guna menemukan sejarah bersama, maka keluhan historis tetap terpelihara (Syukur & Sinaga, 2013: 27).

Sementara itu dalam mempersiapkan penggabungan Papua ke dalam pangkuan NKRI pemerintah menurunkan sukarelawan yang direkrut dari berbagai daerah. Sukarelawan tersebut dilatih dan dipersiapkan

di Jakarta kemudian secara bertahap dikirim ke Tanah Papua pada paruh akhir tahun 1962.

### **Biografi Noerhasyim Gandhi**

Salah seorang sukarelawan pejuang integrasi tanah Papua yang bernama Drs. KH. Noerhasyim Gandhi bin Ghozali. Lahir di Banyuwangi 11 Agustus 1935 dan wafat di Sorong 12 Oktober 2013. Noerhasjim Gandhi awalnya merupakan utusan Departemen Agama untuk memenuhi permintaan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat untuk mengirimkan sukarelawan Guru Agama Islam. Selain Noerhasjim terdapat nama H.A. Mursjid Hanafiah, Tamrin Muzni, Moh Ali Irfan dan Djamberansjah Chalil yang ditugaskan ke Papua.

KH. Noerhasyim Gandhi merupakan salah seorang ulama pejuang yang tiba di Papua pada 5 Desember 1962 beberapa bulan pasca peristiwa Macan Tutul yang menewaskan Komodor Yos Sudarso. Dalam riwayat pendidikannya beliau menimba ilmu dari ayahnya (angkat) Kyai Moh. Shodiq di Banyuwangi, belajar *Qiraah Sab'ah* pada KH. Abd. Karim di Gresik, santri KH. Ahmad Damanhuri di Malang.

### **Kiprah Noerhasyim Gandhi**

Noerhasjim mengawali kiprahnya di Waigama, Misool-Raja Ampat sebagai guru Sekolah Dasar. Kisah menarik ketika terjadi ketika penyerahan Irian Barat kepada RI 1 Mei 1963 dilaksanakan upacara penurunan bendera PBB dan

dikibarkannya "Sang Saka Merah Putih" Kepala Distrik (bestuur) tidak berani menjadi inspektur upacara karena sebelumnya sudah tersiar kabar dari penduduk asli bahwa kalau bendera Indonesia berkibar, bendera Papua juga akan dikibarkan oleh sekelompok penduduk setempat yang anti terhadap Indonesia dan mendapat dukungan dari Belanda.

Dengan keberanian dan jiwa patriot yang dimilikinya tampillah KH. Noerhasyim Gandhi sebagai Inspektur Upacara "Bestuur yang takut kemudian menunjuk saya, akhirnya saya terima, dan apa pun yang akan terjadi akan saya hadapi, saya berniat jibaku (Jepang). Alhamdulillah saat bendera Merah Putih dikibarkan diikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh anak-anak sekolah, meneteskan air mata sambil menghormat bendera merah putih." (Dikutip dari catatan riwayat hidup KH. Noerhasyim Gandhi).

Noerhasjim Gandhi tergabung dalam laskar kesatuan yang bersifat rahasia dan bergerak di bawah tanah bernama OPI (Organisasi Pemuda Irian/Indonesia) yang awalnya berkedudukan di Misool di bawah pimpinan Abdul Rauf Anakotta dan di Yefman Salawati dengan pimpinan Basir Madjena, organisasi ini awalnya dibentuk oleh Y. Kuba Kilikulat, Hamis Rumagesan dan Rachban Puara. Laskar pejuang lain di sekitar Sorong (kini Prov. Papua Barat) di antaranya; gerakan

Kesatuan Islam Nieuw Guinea (KING) pimpinan Raja Rumbati Ibrahim Bauw, Gerakan Organisasi Pemuda Cendrawasih Muda pimpinan Mahmud Singgirei Rumagesan (Raja Kokas) dan Abbas Iha. Di Kaimana terdapat Gerakan Persatuan Islam Kaimana (PIK) pimpinan Usman Saad dan Raja Namatota Umbair, semua gerakan tersebut bertujuan menentang pendudukan Belanda.

Selain itu terdapat organisasi pembebasan Irian Barat yang didirikan oleh Raja Mahmud Singgirei Rumagesan dalam pembuangannya di Makassar pada tahun 1953 bernama Gerakan Tjenderawasih Revolusioner Irian Barat (GTRIB) yang bertujuan membantu Pemerintah Republik Indonesia memperjuangkan pembebasan Irian Barat dari cengkeraman kolonial Belanda.

Noerhasjim menikah di Misool dengan Haurah Sangaji kemudian bergerak ke Kota Sorong bergabung bersama pejuang lain mempersiapkan dan mengawal PEPERA tahun 1969. Di Kota Sorong beliau konsentrasi di bidang Keagamaan dan Pendidikan. selain mengajar Noerhasjim dan kawan-kawan di antaranya H. Uso tetap bergabung dengan OPI pimpinan Bastian Samori dan Elimelek Ayomi.

Sebagai anggota gerakan dari organisasi pejuang yang tugas utamanya sebagai guru Noerhasjim dan kawan-kawannya diawasi diam-diam oleh otoritas UNTEA yang masih ditungguangi

Belanda. Peran sebagai guru agama yang dihormati cukup membantu dalam mendekati tokoh agama dan masyarakat setempat dan hal tersebut cukup memudahkan dalam mengemban tugas mempengaruhi pilihan dalam PEPERA di kemudian hari.

Para pejuang integrasi yang menyamar sebagai guru bertugas menyerap informasi menyangkut persiapan Belanda mempertahankan Irian dan pengaruhnya terhadap rakyat Irian Barat, informasi yang dikumpulkan laskar OPI meliputi persenjataan, kekuatan tentara dan pejuang lokal Papua yang memihak Belanda, kubu pertahanan dan lokasinya. Kota Sorong menjadi rawan karena merupakan basis pertahanan Belanda yang cukup terbuka dan mudah diakses dari luar.

Pada masa tersebut pihak Belanda pada tahun 1960 telah membentuk Batalyon sukarelawan Papua (Papua Vrijwilligers Korps) dan berkedudukan di Arfai, Manokwari. Sebelumnya telah terbentuk Nieuw Guinea Raad (semacam Parlemen atau Vlooksraad) pada tahun 1952 dan dilanjutkan dengan pembentukan 10 dewan daerah (*streekraad*). Pembentukan kelompok semi militer (milisi rakyat) dan lembaga demokrasi kolonial ini dimaksudkan untuk diperhadapkan dan menindas gerakan dan keinginan masyarakat Papua yang dinilai pro-Indonesia.

Setelah Belanda mengetahui keberadaan gerakan pejuang

bawah tanah OPI yang sangat membahayakan masa depan Belanda di Papua maka mulailah polisi dan tentara Belanda menggeledah rumah-rumah pemimpin dan anggota gerakan. Para pemimpin gerakan yang paling anti Belanda mulai ditangkap di antaranya Elias Paprindey, Bastian Samori, Abraham Koramat, Abd. Rauf Anakotta dan lainnya sementara beberapa anggota pun ikut disekap. Noerhasjim Gandhi, H. Uso dan sukarelawan lainnya selamat karena mendapat perlindungan dari masyarakat, buah dari hubungan baik yang selama ini dibangun.

Para pemimpin yang ditangkap kemudian dikirim ke penjara-penjara tanah Papua, di antaranya penjara Doom yang terletak di pulau kecil dekat Sorong, ada yang divonis 3 bulan bahkan 5 bulan. Para anggota OPI wajib lapor setiap hari yang berlangsung selama 3 sampai 6 bulan, Noerhasjim dan beberapa kawan pejuang mendapat hukuman wajib lapor selama 4 bulan.

Terbebas dari wajib lapor kemudian dipecat sebagai guru yang mendapat tunjangan gaji dari UNTEA namun mereka tetap setia melaksanakan tugas-tugas kelaskaran OPI dengan semakin memperluas pengaruh merekrut anggota untuk ikut secara aktif membantu pasukan-pasukan penyusup TNI yang sudah mulai memasuki Papua dan sebagiannya berada di pulau-pulau perairan sekitar Raja

Ampat yang sudah dominan berpihak ke Indonesia.

Setelah peristiwa pendaratan Pasukan Garuda (PG) 100, PG 200, PG 300 dan PG 400 maka seluruh gerakan laskar lokal diperintahkan bersiap menerima dan mendukung penyerbuan sasaran Belanda yang masih bertahan. Pasukan Garuda 200 yang mayoritas anggotanya putra asli Papua menysasar Etnabay dan menyapu pulau-pulau sekitar Raja Ampat, Manokwari hingga Nabire. Pasukan penyusup setelah berhasil mendarat di pantai Sorong (kini disebut KM 8) terus menyebar masuk ke jantung Kota Sorong, selang beberapa hari kemudian terjadilah kontak senjata yang berawal dari kejar mengejar dan pertempuran gerilya yang menyebabkan Letnan Jamaluddin Nasution dan seorang anggotanya gugur di belakang Kampung Baru. Pertempuran lainnya juga terjadi di Kampung Rufei, KM 11 dan KM 8 dan tercatat seorang Letnan Polisi Belanda bernama Karly tewas tertembak.

Sukarelawan Trikora cukup besar perannya dalam mempengaruhi pilihan masyarakat Papua dalam PEPERA dengan melakukan pendekatan kepada tokoh adat dan masyarakat yang tergabung dalam DMP (Dewan Musyawarah PEPERA). Mereka bukan hanya berhasil mendekati tokoh yang beragama Islam tapi juga yang menganut Kristen dan agama lokal lainnya.

Noerhasjim dan kelompoknya meski berasal dari Jawa mampu berkomunikasi dengan baik bersama penduduk setempat yang ternyata cukup memahami bahasa Melayu. Noerhasjim seringkali berjalan jauh hingga ke pedalaman Sorong, memasuki perkampungan suku Moi dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh adat/suku setempat untuk mempromosikan kemajuan yang telah dicapai Indonesia pada masa itu khususnya geliat pembangunan di Ibukota Jakarta. Interaksi beberapa suku di pedalaman Sorong (Papua daratan) dengan beberapa kerajaan Islam dalam naungan Kesultanan Tidore disebutkan telah berlangsung cukup lama sehingga cukup memudahkan dalam interaksi dengan pendatang meski berbeda agama dan keyakinan.

Para raja kecil di sekitar Fakfak dan Raja Ampat memiliki tugas utama sebagai Kepala Umat Islam, mereka dipilih berdasarkan tra/darah dan kedalaman penguasaan ilmu agamanya. Sejak masuknya kolonial belanda pengaruh kekuasaan para raja tersebut menjadi amat terbatas, hal ini menyebabkan sering kali terjadi perlawanan yang dipimpin oleh para raja semisal Machmud Singgirei Rumagesan (1885-1965) di Kerajaan Sekar dan Ibrahim Bauw raja Rumbati, sebagai tokoh agama melalui seruan dari mimbar-mimbar masjid mereka menggelorakan semangat perlawanan dilandasi

jihad *fisabilillah* menentang penindasan penjajah.

Raja Machmud Singgirei Rumagesan kemudian menjadi sosok pejuang integrasi Papua asal Fakfak yang gaungnya cukup besar. Keberaniannya menentang penjajah Belanda telah mengantarkannya beberapa kali masuk penjara, seperti penjara Saparua, Sorong-Doom, Manokwari, Hollandia (sekarang Jayapura) hingga ke penjara dan pengasingan di Makassar. Semangat beliau untuk menggabungkan Irian Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipadamkan dengan berkali-kali penangkapan dan vonis penjara oleh pengadilan Belanda, dia tidak hanya berjuang untuk wilayah kerajaannya saja tapi semangatnya meliputi seluruh wilayah Irian Barat termasuk Sorong tempat Noerhasjim Gandhi dan sukarelawan integrasi lainnya berjuang. Komitmen dan kegigihan Machmud Singgirei Rumagesan dalam perjuangan pengintegrasian Papua kemudian mengantarkannya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Republik Indonesia periode Juli 1959-Juli 1965.

Pada bidang pendidikan Kota Sorong Noerhasjim Gandhi dikenal sebagai perintis berbagai madrasah dan perguruan tinggi yang eksis hingga hari ini, mulai dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah hingga perguruan tinggi. Madrasah tersebut di antaranya An-Nur, Al Ma'arif hingga MAN

Sorong, YAPIS, STID Al Hikmah yang kemudian menjadi STAIN Sorong. Tahun 1965 dibangun PGA (Pendidikan Guru Agama) di Sorong dan banyak putra lokal Papua yang menjadi muridnya, hal tersebut cukup berpengaruh dalam memperkenalkan nama baik Indonesia di mata warga Papua.

Dalam tekanan dan pengawasan otoritas UNTEA, sosok Noerhasjim Gandhi yang karismatik dan dihormati bersama beberapa sahabatnya dan jaringan kader Nahdatul Ulama (NU) yang telah dibangun dengan aktivitas di dunia pendidikan dan aktivitas keagamaan terus mengkampanyekan pilihan terbaik memilih bergabung dengan Indonesia dengan menggunakan pendekatan kultural hingga hari-hari menjelang berlangsungnya *Act of Choice/Pepera* yang berhasil dengan suara bulat 110 orang perwakilan DMP Sorong membawa Irian Barat bergabung dengan Indonesia.

## **PENUTUP**

Jiwa dan semangat nasionalisme KH. Noerhasjim Gandhi tertanam sedari beliau yang ditempa dalam laskar Hizbullah pada tahun 1946 di Pesantren Karang Binangun pimpinan Kyai Maksud Surabaya. Noerhasjim Gandhi mengidolakan Soekarno dan dalam beberapa catatan hariannya menulis "Pemimpin Besar Revolusi Soekarno-Hatta titip kepada kita untuk meneruskan perjuangan menjaga

NKRI". Sebagai kader IPNU beliau juga aktif dalam berbagai organisasi di Sorong di antaranya sebagai Ketua maupun Rois Nahdlatul Ulama Sorong dan Papua Barat, MUI Kabupaten Sorong, hingga sebagai deklarator PKB Kabupaten Sorong. KH. Noerhasjim Gandhi adalah seorang sosok ulama pejuang yg hidup bersahaja hingga akhir hayatnya, mengabdikan ilmunya untuk kemaslahatan agama, bangsa dan negaranya.

#### Daftar Pustaka

BPS Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat 2018.

<http://warejapapuaaku.blogspot.com/2013/12/sejarah-kembalinya-papua-ke-pangkuan.html> Akses 3 Januari 2018

Muslim, A. 2014. Dakwah Peka Kultur Ala Aipon Asso: Potret Keber-islaman Pegunungan Tengah Papua. *Harmoni*, 13(3), 7-21.

Mustafa, Muhammad Sadli, 2016. *Merawat Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Papua Barat*. Laporan Hasil Penelitian: Litbang Agama Makassar.

Muyasaroh, Umi, 2015. *Konflik Indonesia dengan Australia dalam Masalah Pengembalian Irian Barat Tahun 1949-1962*. Skripsi. Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan

Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Richo Korwa. 2014. Proses Integrasi Papua Barat ke Dalam NKRI. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Rohim, Nur. 2014. Optimalisasi Otonomi Khusus Papua dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik dan Kekerasan. *Jurnal Fiat Justisia Vol. 8 No. 1. 80-97*.

Subair, Muh, 2013. Kiprah Hj. Sitti Chadijah Toana Memperjuangkan HAM Perempuan di Palu, Biografi Kehidupan Tokoh Agama Perempuan. *Jurnal Al-alam Vol 19 No. 2*.

Sugandi, Yulia, 2008. *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*. Friedrich Ebert Stiftung (FES): Jakarta.

Syukur, Abdul & Sinaga Rosmaida. 2013. *Machmud Singgirei Rumagesan; Pejuang Integrasi Papua*. Penerbit Ruas: Jakarta.